

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH:
DONA MARSELINA
12190480**

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dona Marselina
NIM : 12190480
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Yang menyatakan



(Dona Marselina)
NIM.12190480

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

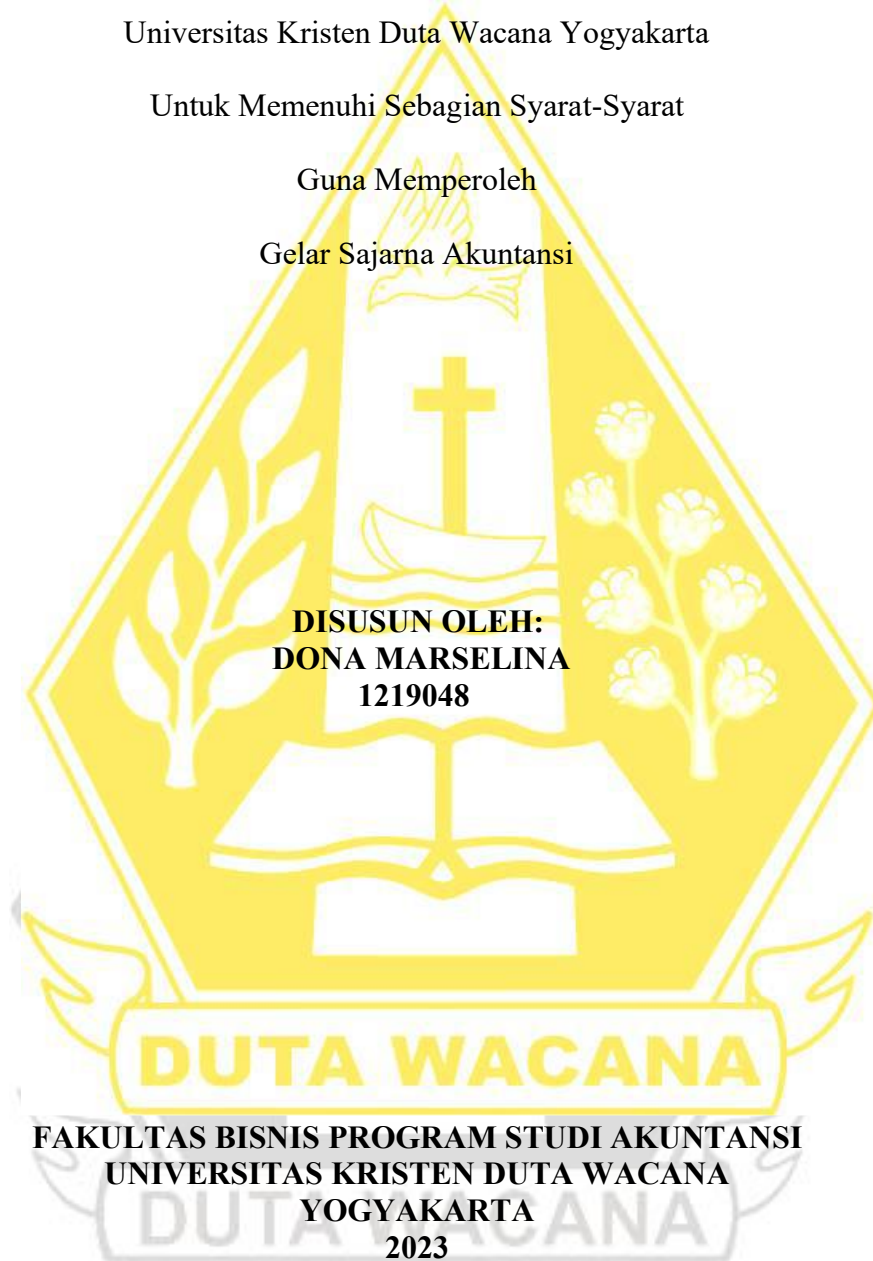
Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sajarna Akuntansi



**DISUSUN OLEH:
DONA MARSELINA
1219048**

DUTA WACANA

**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

DONA MARSELINA

12190480

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 23 Juni 2023

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc.

(Ketua Tim Penguji)

2. Dra. Agustini Dyah Respati, MBA.

(Dosen Penguji)

3. Dra. Putriana Kristanti, MM., Akt., CA.

(Dosen Pembimbing)

Yogyakarta, 03 Juli 2023

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si

Ketua Program Studi Akuntansi



Christine Novita Dewi, SE, M.Acc, Ak, CA. CMA., CPA.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**“ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 06 Juni 2023



Dona Marselina

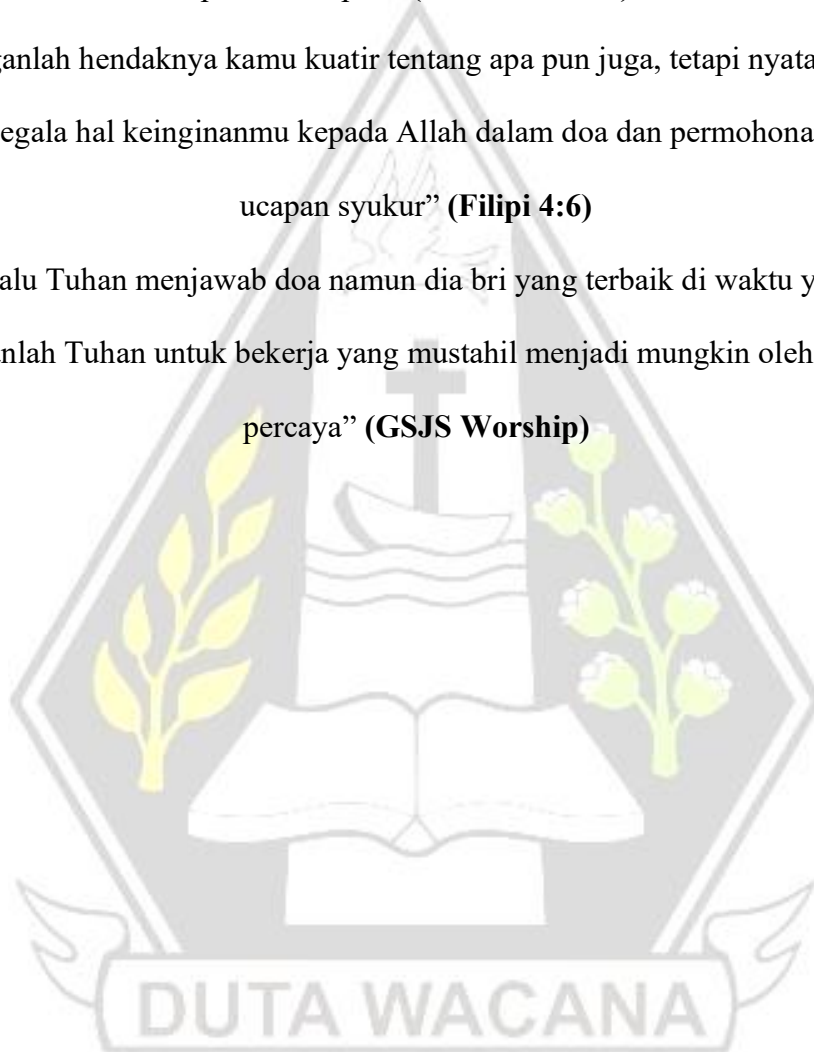
12190480

HALAMAN MOTTO

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan” (**Yeremia 29:11**)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur” (**Filipi 4:6**)

“Tak selalu Tuhan menjawab doa namun dia bri yang terbaik di waktu yang tepat, ijinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh kar’na percaya” (**GSJS Worship**)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, hikmat, kasih, kesabaran, kekuatan, dan kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua yaitu Bapak Doyo Ahim dan Ibu Minarnie, serta kakak saya Deynitra Aksari, Chepy Fernita, Apridita, Ronal Septiawan, Okki Andaresta yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, semangat maupun dukungan dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt., CA. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. BPKAD KALTIM yang sudah menyediakan website untuk memperoleh informasi yang diperlukan penulis.
5. Seluruh dosen Prodi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama penulis menempuh ilmu di Universitas Kristen Duta Wacana.
6. Untuk diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan atas segala proses yang dihadapi sampai saat ini.
7. Sahabat penulis Ottriana, Cerafika, Olivia, dan Putri yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta penghiburan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sosial media terkhususnya TikTok yang sudah memberikan banyak informasi seputar skripsi, kata-kata motivasi, dan penghiburan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

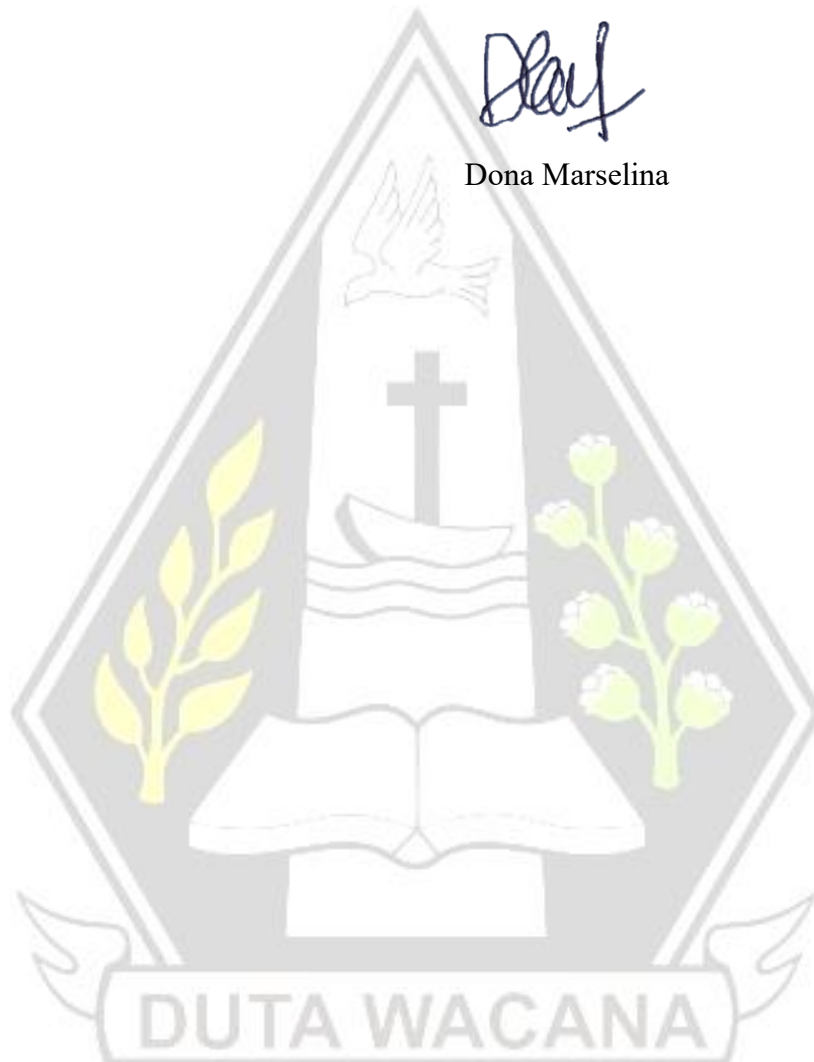
1. Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh dosen dan staf Fakultas Bisnis atas arahan dan bantuanyang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Kristen Duta Wacana.
3. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
4. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
5. Sahabat Otriana, Putri, Oliv, Fika yang selalu mendoakan dan menghibur saya, serta telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 07 Juni 2023



Dona Marselina



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan	9
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah	16
2.2 Studi Pustaka	19
2.2.1 Penelitian Terdahulu	19
BAB III	23
METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	23

3.2	Langkah-langkah Penelitian	24
3.2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	24
3.2.2	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	26
3.2.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	27
3.2.4	Rasio Keserasian	28
3.2.5	Rasio Pertumbuhan	30
3.3	Gambaran Umum Perusahaan	32
3.3.1	Kondisi Geografis dan Iklim.....	32
3.3.1	Data Variabel	34
3.3.2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35
3.3.3	Visi dan Misi.....	35
3.3.4	Struktur Organisasi.....	36
BAB IV		37
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Analisis Hasil	37
4.2	Pembahasan	58
4.2.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	58
4.2.2	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	59
4.2.3	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	61
4.2.4	Rasio Keserasian Keuangan Daerah	62
4.2.5	Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah.....	64
BAB V.....		67
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	26
Tabel 3. 2 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	27
Tabel 3. 3 Tingkat Efisiensi Keuangan	28
Tabel 3. 4 Tingkat Rasio Pertumbuhan	31
Tabel 3. 5 Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4. 1 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	38
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	41
Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	44
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	47
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	50
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2021	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi	36
Gambar 4. 1 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur .	39
Gambar 4. 2 Grafik Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur	42
Gambar 4. 3 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	45
Gambar 4. 4 Grafik Rasio Keserasian Belanja Operasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur	48
Gambar 4. 5 Grafik Rasio Keserasian Belanja Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur	51
Gambar 4. 6 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur	54
Gambar 4. 7 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	55
Gambar 4. 8 Grafik Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Timur	56
Gambar 4. 9 Grafik Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	74
Lampiran 2 Hasil Olah Data.....	81
Lampiran 3 Grafik Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	84
Lampiran 4 Halaman Persetujuan.....	88
Lampiran 5 Kartu Konsultasi.....	89
Lampiran 6 Lembar Revisi.....	90
Lampiran 7 Point Keaktifan.....	91
Lampiran 8 Turnitin.....	92



**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dona Marselina

12190480

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dona.marselina@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kecerasan, dan Rasio Pertumbuhan pada tahun 2015-2021. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif berupa data sekunder pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian dikategorikan tinggi dengan pola hubungan delegatif. Rasio efektivitas dikategorikan sangat efektif. Rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien. Rasio keserasian menunjukkan sebagian besar dana Provinsi Kalimantan Timur masih memprioritaskan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal, maka rasio keserasian menunjukkan belum seimbang. Rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Operasi, dan Belanja Modal termasuk pertumbuhan yang berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun-tahun tertentu. Dengan penelitian ini, diharapkan untuk harus terus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatan yang sudah ada seperti meningkatkan potensi daerah dengan mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Implikasinya semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat cenderung rendah. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak dan retribusi daerah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Kecerasan, Rasio Pertumbuhan

**PERFORMANCE ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN EAST
KALIMANTAN PROVINCE**

Dona Marselina

12190480

Accounting Studies Program Faculty of Business

Duta Wacana Christian University

dona.marselina@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

The study aims to analyze the Financial Management Performance of the Province of East Kalimantan as seen from the Regional Financial Independence Ratio, Regional Natural Income Efficiency ratio, Regional Financial Effectiveness ratio and Growth ratio in 2015-2021. The type of research used descriptive quantitative data is secondary data on the Revenue and Purchase Budget Report of the Province of Kalimantan East, with data collection techniques using documentation methods. The results of the study show that the ratio of independence is categorized high with the pattern of delegative relationship. The efficiency ratio categorized is very effective. The efficiency ratio is classified as inefficient. The compatibility ratio shows that most of the East Kalimantan Province funds still prioritize operating spending rather than capital spending, so the compatibility ratios show not balanced. The growth ratio on the components of Regional Natural Income, Regional Revenue, Operational Shopping, and Capital Shopping includes fluctuating growth, i.e. increases and decreases in certain years. With this research, it is expected to continue to optimize the acceptance of existing potential income such as increasing the potential of the region by looking for new sources of financing. The implications of increasing regional financial independence, the level of dependence of the region on the central government tends to be low. In addition, a high level of public awareness in paying local taxes and remuneration contributes to the improvement of society's well-being.

Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, peran pemerintah dalam perkembangan organisasi sektor publik sangat penting mengingat pemerintah merupakan salah satu entitas sektor publik yang dominan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai dasar rangkaian reformasi kelembagaan untuk menjadikan pemerintah yang efektif, efisien, ekonomis, partisipatif, transparan, serta akuntabilitas. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan, karena hal tersebut berdampak pada kepemilikan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi secara mandiri dalam kegiatan pemerintahnya dan tidak terlalu mengandalkan bantuan pusat. Hal ini mencakup berbagai tahapan termasuk penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, evaluasi hasil, dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Dalam menerapkan prinsip otonomi daerah, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar dan perlu dipertimbangkan, mengacu pada perkembangan dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, masyarakat menghendaki kemandirian (desentralisasi) dan transparan, daerah harus memiliki kompetensi untuk mengelola keuangan daerah berdasarkan kemampuan pendapatan asli daerah yang dimiliki. Selain itu, masyarakat juga menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjalankan pengelolaan keuangan daerah dengan efektif dan efisien yang semakin meningkat. Masyarakat juga menginginkan adanya transparansi dalam proses pengelolaan

tersebut. Di sisi lain, dalam keadaan di luar negeri persaingan antara negara semakin meningkat sebagai akibat dari globalisasi. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu memiliki daya saing yang tinggi. Untuk mencapai daya saing, peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Melalui peningkatan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah akan mampu mencapai daya saing yang diinginkan, dan salah satu caranya adalah melalui penerapan konsep otonomi daerah.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi, diharapkan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan daerah harus lebih kreatif dan inovatif. Hal tersebut disebabkan sebagai kelangsungan pembiayaan pengelolaan dan pembangunan maka satuan kerja pengelolaan pendapatan daerah wajib dalam mengoptimalkan pada peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendorong perluasan pertumbuhan otonomi (Siregar dan Mariana, 2020). Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi sebuah mekanisme yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat setempat melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya alam, otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada penduduk setempat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diharapkan melalui penyelenggaraan otonomi daerah akan meningkatkan kualitas maupun daya saing daerah otonom yang akan mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa: Laporan keuangan memegang peranan penting dalam memberikan informasi yang akurat mengenai posisi

keuangan dan transaksi yang terjadi selama periode pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun secara sederhana agar pembaca laporan keuangan dapat dengan mudah memahaminya, karena tidak semua orang yang menggunakan laporan keuangan memiliki pemahaman yang mendalam tentang akuntansi, namun hanya mengharapkan informasi yang diberikan. Dalam hal ini sangat diperlukan analisis dalam laporan keuangan karena membantu mengatasi keterbatasan pengetahuan dan pemahaman untuk menginterpretasikannya. Melalui analisis, pembaca laporan keuangan dapat menggali informasi lebih dalam dan lebih memahami baik tentang kinerja keuangan yang bersangkutan.

Selain itu, untuk menaikkan kualitas dan kebijakan dalam mengelola keuangan daerah, serta mengevaluasi efektivitas otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dalam mengelola keuangan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan sejauh mana kinerja akan tercapai, khususnya pada keuangan daerah seperti pendapatan dan pengeluaran daerah melalui sistem keuangan yang ditentukan berdasarkan kebijakan atau peraturan undang-undang selama periode anggaran. Melalui analisis rasio keuangan, dapat dinilai sejauh mana Pemerintah Daerah telah berhasil mencapai target keuangan yang telah ditetapkan, memahami efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan dalam pengelolaan keuangan daerah (Natoen *et al*, 2019).

Pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki signifikansi yang besar dalam pertanggungjawaban organisasi dan pemerintah karena membantu dalam menilai dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang tepat, pengalokasian sumber daya yang efektif, supaya terwujudnya akuntabilitas publik yang baik. Akuntabilitas tidak hanya

mencakup kemampuan untuk mengungkapkan penggunaan keuangan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis, tetapi juga digunakan ketika menilai terlaksananya suatu program atau kegiatan. Dengan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, yaitu: Pertama, meningkatkan kinerja pemerintah, dengan mengukur kinerja sektor publik secara keseluruhan. Kedua, alokasi sumber daya maupun pengambilan keputusan dipergunakan untuk mengukur kinerja sektor publik. Ketiga, tanggung jawab publik untuk meningkatkan kelembagaan termasuk pengukuran kinerja sektor publik (Ropa, 2016).

Kinerja keuangan daerah memegang peranan penting dalam kepentingan publik sebagai dasar evaluasi kinerja, umpan balik atas rencana kerja dan pelaksanaannya, serta meningkatkan kinerja keuangan pada periode berikutnya. Dengan demikian, dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dengan menggunakan kriteria finansial maupun non-finansial. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan publik yang memadai. Salah satu cara untuk melaksanakan tanggung jawab ini pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dana yang digunakan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memberikan akuntabilitas kepada masyarakat berdasarkan pada konsep pengukuran kinerja keuangan daerah.

Saat ini, sedang terjadi fenomena di Kalimantan Timur yang melibatkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, sesuai dengan Keputusan Pemerintah oleh presiden Joko Widodo. Keputusan ini merupakan langkah resmi yang diambil oleh Preside Joko Widodo. Pemilihan Kalimantan

Timur sebagai lokasi ibu kota negara didasarkan pada beberapa faktor, sebagai berikut:

- a. Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru adalah karena minimnya risiko bencana. Pemerintah yakin bahwa daerah Kalimantan Timur memiliki tingkat kerentanan yang rendah terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan letusan gunung berapi.
- b. Lokasi yang strategis (di tengah Indonesia), berdasarkan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara diperkirakan strategis karena terletak di tengah Indonesia.
- c. Lokasi berdekatan dengan daerah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda), kedekatan lokasi dengan daerah yang lebih maju memudahkan pembangunan ibu kota baru.
- d. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, kondisi kawasan yang layak di daerah Kalimantan Timur dengan banyak lahan kosong luas, fasilitas di lokasi baru cukup bermanfaat. Hal tersebut mulai dari jalan tol hingga dekat bandara internasional.
- e. Lahan atau tanah milik pemerintah seluas 180.000 hektar. Hal tersebut membuat lebih mudah untuk membangun pemerintahan.

Berdasarkan fenomena tersebut, pertanggungjawaban terhadap kinerja keuangan sangat diperlukan, agar Pemerintah Daerah memiliki gambaran yang jelas terhadap pelayanan publik dan pembangunan pada masyarakat, sehingga pertanggungjawaban menjadi dasar penilaian kinerja keuangan dalam memberikan

informasi transparan kepada publik, dan untuk ikut memantau kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti melakukan penelitian berjudul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur” selama periode tahun 2015-2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan sebagai dasar analisis rasio keuangan yang telah dianggarkan maupun direalisasikan sehingga dapat mengevaluasi dan mengetahui suatu kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara periode yang berbeda, seperti periode sebelumnya. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang perbedaan tren pembangunan yang terjadi. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa rasio keuangan termasuk rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut

- a) Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur menggunakan rasio kemandirian selama periode tahun 2015-2021?
- b) Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur menggunakan rasio efektivitas selama periode tahun 2015-2021?
- c) Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur menggunakan rasio efisiensi selama periode tahun 2015-2021?

- d) Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur menggunakan rasio keserasian selama periode tahun 2015-2021?
- e) Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur diukur menggunakan rasio pertumbuhan selama periode tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rasio kemandirian selama periode tahun 2015-2021.
- b) Untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rasio efektivitas selama periode tahun 2015-2021.
- c) Untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rasio efisiensi selama periode tahun 2015-2021.
- d) Untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rasio keserasian selama periode tahun 2015-2021.
- e) Untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rasio pertumbuhan selama periode tahun 2015-2021.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini untuk beberapa pihak sebagai berikut:

a) Bagi Akademis

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan pada kajian kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, penelitian ini memiliki potensi dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai panduan, pengambilan keputusan, dan masukan yang tepat bagi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.5 Batasan Penelitian

Bentuk keterbatasan dari penelitian ini adalah keterbatasan periode sampel yang dipilih, yaitu hanya tujuh tahun dari tahun 2015-2021. Meskipun peneliti berusaha mencari laporan keuangan untuk periode sepuluh tahun, namun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur hanya mencakup periode tujuh tahun. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data dari tahun 2015-2021 sebagai periode penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan rasio kemandirian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2021 dikategorikan tinggi dengan pola hubungan delegatif. Artinya daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemandirian dalam membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung sepenuhnya pada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekuatan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi pemerintahannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat cenderung rendah. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak dan retribusi daerah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Berdasarkan rasio efektivitas, kinerja pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2021 dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Pemerintah Daerah tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keefektifan ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah

mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin besar rasio efektivitas maka kemampuan daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah menjadi lebih baik.

- c. Berdasarkan rasio efisiensi, kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2021 termasuk dalam kategori tidak efisien. Pemerintah Daerah tersebut belum mampu secara optimal dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, terutama dalam pemungutan pendapatan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan anggaran daerah juga belum efisien. Hal ini menggambarkan bahwa semakin besar rasio efisiensi maka semakin rendah tingkat kemampuan daerah dalam menjalankan dan melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah.
- d. Berdasarkan rasio keserasian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015-2021 terkait belanja operasi dan belanja modal belum mencapai tingkat keserasian atau keseimbangan yang diharapkan. Daerah Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalokasikan belanja operasi dengan jumlah dana yang cukup besar daripada untuk belanja modal. Akibatnya, fokus pembangunan daerah belum optimal, karena alokasi dana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana belum memadai. Sebaliknya, dana lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Hal ini menunjukkan semakin besar porsi anggaran yang dialokasikan pada belanja operasi maka semakin kecil porsi belanja modal untuk memfasilitas perkembangan ekonomi masyarakat.
- e. Berdasarkan rasio pertumbuhan, kinerja pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2021 mengalami pertumbuhan

yang meningkat dan menurun pada tahun-tahun tertentu. Dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhannya termasuk kategori rendah sekali, begitu juga dengan pertumbuhan pendapatan daerah yang termasuk kategori sangat rendah sekali. Selain itu, pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal juga termasuk kategori rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum berhasil meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan dari periode sebelum dan berikutnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari perhitungan rasio keuangan dan analisis, maka rekomendasi dari peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk terus meningkatkan potensi daerah, daerah Provinsi Kalimantan Timur harus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatan yang ada. Salah satu langkahnya adalah mencari sumber pendapatan baru melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta, seperti membuka peluang bagi investor dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah di sektor-sektor yang berpotensi. Selain itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk melebihi target yang ditetapkan dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah.
- b. Untuk mempertahankan kinerja yang efektif ini, daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus berupaya untuk melampaui sasaran pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan. Dengan mengambil langkah-langkah tambahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat memastikan kelangsungan kinerja efektif dalam

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat terus mengoptimalkan pendapatan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- c. Dalam menghadapi tantangan ini, daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan jumlah belanja daerah dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Dengan cara ini, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia dan mencapai efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini juga dapat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan, supaya dalam alokasi sumber daya dengan lebih efisien guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d. Dalam menghadapi situasi pada rasio keserasian, perlu diberikan perhatian lebih pada pembangunan daerah. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan alokasi dana untuk belanja modal, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana daerah dapat diutamakan. Hal ini akan membantu mencapai keserasian atau keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, serta memastikan penggunaan dana yang lebih seimbang dalam mendukung perkembangan dan pelayanan masyarakat.
- e. Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum berhasil secara maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan daerahnya secara keseluruhan. Terdapat keterbatasan dalam peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan daerah, serta alokasi belanja operasi dan belanja modal. Dengan demikian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan upaya yang lebih intensif dan strategis, memaksimalkan penerimaan pendapatan, dan

memaksimalkan alokasi belanja agar dapat memperoleh pertumbuhan yang lebih baik di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83-93.
- Asri, G. S. W. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Struktur*. Retrieved from [bpkad.kaltimprov.go.id: https://bpkad.kaltimprov.go.id/struktur/](https://bpkad.kaltimprov.go.id/struktur/). Diakses tanggal 4 Mei 2023
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Transparansi Pengelolaan Anggaran*. Retrieved from [bpkad.kaltimprov.go.id: https://bpkad.kaltimprov.go.id/transparansi-pengelolaan-anggaran/](https://bpkad.kaltimprov.go.id/transparansi-pengelolaan-anggaran/). Diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Visi dan Misi*. Retrieved from [bpkad.kaltimprov.go.id: https://bpkad.kaltimprov.go.id/visi-misi/#top](https://bpkad.kaltimprov.go.id/visi-misi/#top). Diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022). Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka. Kalimantan Timur: BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri Nomor 690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Deswira, A. (2022). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah: studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72-88.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Hakim, Mochammad Faishal. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016. Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Hantoro, Juli. (2019). Lima Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Retrieved from [tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur](https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur). Diakses tanggal 16 Februari 2023.
- Hery. (2015). Analisis Kinerja Manajemen. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 146-166.
- Kominfo. (2019). Ibu Kota Negara Pindah Ke Wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Retrieved from [kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita](https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-wilayah-penajam-pasir-utara-dan-kutai-kartanegara/0/berita). 16 Februari 2023.

- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werimon, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 237-253.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106-117.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2).
- Santoso, R. T., Syukri, M., & Hasanah, N. M. (2021). Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia Widya Wiwaha*, 1(1), 75-94.
- Siregar, A. O. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Image: Jurnal Riset Manajemen*, 9(1), 1-19.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43-59.
- Sumastuti, E., Nariyanti, E., & Indriasari, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 2(2), 97-104.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 11-21.

